

**ABSTRAK**

Harta pailit merupakan kekayaan debitor pailit karena tidak bisa membayar uangnya kepada para kreditornya, sehingga menjadikan kewajiban bagi kurator untuk melakukan eksekusi terhadap harta pailit tersebut, pemberesan yang melalui kantor lelang akan menimbulkan bea lelang untuk segera dibayarkan, akan tetapi mahkamah konstitusi telah memberikan putusan dengan nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan kaidah hukum baru, dimana upah buruh untuk segera di bayarkan dari tagihan-tagihan diantaranya yakni tagihan pajak, kantor lelang dan lainnya, sehingga penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Preferensi Bea Lelang Dari Kantor Lelang Dibanding Upah Buruh Terhadap Harta Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013” dengan dua pokok permasalahan yakni: kedudukan tagihan bea lelang yang timbul dari biaya pelelangan harta pailit. Dan Preferensi tagihan bea lelang terhadap hak-hak buruh dalam pembagian harta pailit pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang menjadikan konsep atau asas hukum sebagai objeknya yang dikaitkan dengan norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sumber datanya berupa bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dan meunjang bahan hukum primer. Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, antara lain; Pedekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Study kasus. Tesis ini bertujuan untuk menjawab preferensi bea lelang dari kantor lelang dibanding upah buruh pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013. Dalam tesis ini ditemukan bahwa bea lelang memiliki kedudukan untuk dibayarkan terlebih dahulu karena ada fungsi subgetair, sedangkan dengan upah buruh memiliki kedudukan diatas kreditor separatis.

**Kata Kunci** : Bea Lelang, Upah Buruh, Harta Pailit.

**ABSTRACT**

Bankruptcy assets represent the assets of bankrupt debtors because they cannot pay the money to their creditors, making it an obligation for the curator to execute the assets of the bankrupt, the issuance through the auction office will result in auction fees to be paid immediately, but the constitutional court has given a decision with a number 67 / PUU-XI / 2013 which provides new legal norms, where laborers' wages to be paid immediately from bills include tax bills, auction offices and others, so the authors try to conduct research under the title "Auction Duty Preference From Auction Offices Than Wages Workers Against Bankruptcy After the Decision of the Constitutional Court Number 67 / Puu-Xi / 2013 "with two main issues namely: the position of the auction fee bill arising from the cost of auctioning bankrupt assets. And Preference of auction fee bills on labor rights in the distribution of bankrupt assets after the Constitutional Court ruling number 67 / PUU-XI / 2013. This research is a normative-juridical research that makes the concept or principle of law as its object which is associated with norms and legal norms in the applicable laws and regulations. So that the source of the data is in the form of legal materials which are divided into primary legal materials in the form of applicable laws and regulations related to the issues discussed, and secondary legal materials related to and supporting primary legal materials. The approach to the problem in this study is divided into three, including; Legislative approaches, case approaches, and case studies. This thesis aims to answer the preferences of auction fees from the auction office compared to labor costs after the Constitutional Court ruling number 67 / PUU-XI / 2013. In this thesis, it is found that auction fees have a position to be paid in advance because there is a sub-water function, while laborers have wages above separatist creditors.

Keywords: Auction Fee, Labor Wages, Bankruptcy.

**MOTTO**

***ABENTAL OMBEK ASAPOK ANGEN***

BERBANTAL OMBAK, BERSELIMUT ANGIN

***SAMI'NA WA ATHO'NA***

“KAMI MENDENGAR DAN KAMI TAAT.”

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini walaupun terdapat hambatan kecil yang berasal dari diri maupun keadaan yang terjadi diluar kehendak penulis yang menjadi kenangan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentunya studi penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu lewat kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang tulus dari relung hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.
3. Bapak Dr. Hadi Subhan S.H., MH. dan Bapak Gianto Al Imron, S.H., MH selaku dosen pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kesabaran ditengah kesibukan dan kondisi kesehatannya, serta memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
4. Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. dan Indrawati S.H., LL.M. selaku dosen penguji tesis yang

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.

5. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan magister kenotariatan di Universitas Airlangga.
6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan dan urusan administrasi saya di Universitas Airlangga.
7. Yang tercinta dan tersayang kedua orang tua saya, Aba mudi dan umik ju yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang selalu menyemangati dan mendukung tanpa lelah serta restu yang senantiasa menyertai dalam setiap doa sehingga saya mampu menyelesaikan tesis dan pendidikan magister ini.
8. Teruntuk kedua kakak saya Drg. Agus Bajjuri dan Istigfaroh beserta para ipar Dr rois hartitin dan Wasilaturahman, terimakasih atas doa nasehat-nasehat dan dukungannya, dengan ini saya dapat menyelesaikan tesis.
9. Teruntuk kekasihku Dewi Ulfa yang selalu menyemangati, mendoakan, dan sekaligus mencemooh saya apabila saya terhanyut pada kemalasan untuk membangkitkan semangat saya dan yang sangat berjasa bagi saya yang sabar dan selalu mendukung mulai awal mendaftarkan Magister

## IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kenotariatan Universitas Airlanggasampai akhirnya selesai menempuh Magister Kenoataritan.

10. Teruntuk teman rasa saudara kandung Dimas Prasetya, Yazid sidqi, Adam, Andre, dan Kurniawan. yang selalu mendukung dan menemani mulai awal saya menjadi mahasiswa baru sampai lulus dan sekaligus teman satu konsulat yang selalu membangkitkan saat kemalasan menyelimuti dan yang membangkitkan disaat saya tumbang, sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis.

Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa maka penulis amat sadar bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 13 Januari 2020

Penulis,

Shohibul Khoir

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undan-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*  
(*Staatsblad* 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembar  
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembar Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 131)

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Lembar  
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39)

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan  
Paja(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 147)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor 270)